



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah
 1. pendapatan asli daerah : Rp737.085.148.818,02
 2. pendapatan transfer : Rp8.001.011.982.516,00

3.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	:	<u>Rp20.762.286.910,00</u>
	jumlah pendapatan	:	Rp9.561.268.402.110,02
b.	belanja daerah		
1.	belanja operasi	:	Rp5.548.061.676.363,76
	a) belanja pegawai	:	Rp2.211.134.276.861,80
	b) belanja barang dan jasa	:	Rp3.172.793.571.899,96
	c) belanja subsidi	:	Rp97.812.000,00
	d) belanja hibah	:	Rp160.975.315.602,00
	e) belanja bantuan sosial	:	Rp3.060.700.000,00
2.	belanja modal	:	Rp5.548.061.676.363,76
	a) belanja modal tanah	:	Rp43.990.583.745,55
	b) belanja modal peralatan dan mesin	:	Rp522.663.266.328,00
	c) belanja modal gedung dan bangunan	:	Rp940.303.876.464,25
	d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	:	Rp1.229.832.571.263,75
	e) belanja modal aset tetap lainnya	:	Rp739.858.977,00
	f) belanja modal aset lainnya	:	Rp113.345.000,00
3.	belanja tidak terduga	:	Rp0,00
4.	belanja transfer	:	<u>Rp1.105.901.232.578,00</u>
	jumlah belanja	:	Rp9.391.606.410.720,31
	surplus/(defisit)	:	Rp169.661.991.389,71

- c. pembiayaan daerah
 - 1. penerimaan pembiayaan : Rp165.936.420.824,47
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya : Rp165.936.420.824,47
 - 2. pengeluaran pembiayaan : Rp0,00
 - a) penyertaan modal daerah : Rp0,00
 - 3. pembiayaan netto : Rp165.936.420.824,47
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan : Rp335.598.412.214,18

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

No.	Uraian	Reff	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	<u>Pendapatan Daerah</u>	<u>5.1.1.</u>	364.451.980.000,00	272.347.188.908,84	74,73	165.870.568.096,40
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.1.1.1.	487.820.481.700,00	361.304.048.535,87	74,06	5.879.733.796,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	44.145.888.234,00	51.210.843.864,81	116,00	88.383.259.737,59
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	56.670.097.270,00	52.223.067.508,50	92,15	527.466.608.979,49
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.				
6	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4.				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		953.088.447.204,00	737.085.148.818,02	77,34	787.600.170.609,48
8	Pendapatan Transfer	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	9.840.984.241.170,00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	608.978.151.168,00
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		0,00	0,00	0,00	152.452.133.560,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		0,00	0,00	0,00	354.448.698.229,73
14	Dana Bagi Hasil (DBH)		8.024.264.718.882,20	6.985.019.353.999,00	87,05	0,00
15	Dana Alokasi Umum (DAU)		617.572.724.000,00	616.617.480.715,00	99,85	0,00
16	Dana Alokasi Khusus (DAK)		446.637.360.000,00	399.375.147.802,00	89,42	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		9.088.474.802.882,20	8.001.011.982.516,00	88,03	10.956.863.224.127,73
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2.				
19	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Desa		200.570.888.000,00	160.823.537.614,00	80,18	195.105.755.000,00
21	Insentif Fiskal		15.684.292.000,00	15.684.292.000,00	100,00	34.790.318.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		216.255.180.000,00	176.507.829.614,00	81,62	229.896.073.000,00
23	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3.				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		631.823.379.469,00	558.565.654.252,00	88,41	588.414.513.069,00
25	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi		67.335.500.000,00	67.335.500.000,00	100,00	58.440.000.000,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		699.158.879.469,00	625.901.154.252,00	89,52	646.854.513.069,00

27	Total Pendapatan Transfer		10.003.888.862.351,20	8.803.420.966.382,00	88,00	11.833.613.810.196,73
28	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.1.1.3.				
29	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		228.117.657.072,33	20.762.286.910,00	9,10	80.932.955.307,69
31	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		228.117.657.072,33	20.762.286.910,00	9,10	80.932.955.307,69
32	Jumlah Pendapatan		11.185.094.966.627,53	9.561.268.402.110,02	85,48	12.702.146.936.113,90
33						
34	Belanja Daerah	5.1.2.				
35	Belanja Operasi	5.1.2.1.				
36	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	2.517.314.397.869,16	2.211.134.276.861,80	87,84	2.031.277.587.743,00
37	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2.	3.941.322.792.266,52	3.172.793.571.899,96	80,50	4.070.345.469.854,34
38	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	110.704.000,00	97.812.000,00	88,35	101.040.120,00
39	Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	200.121.806.525,00	160.975.315.602,00	80,44	246.099.465.443,00
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	3.191.100.000,00	3.060.700.000,00	95,91	25.188.000.000,00
41	Jumlah Belanja Operasi		6.662.060.800.660,68	5.548.061.676.363,76	83,28	6.373.011.563.160,34
42	Belanja Modal	5.1.2.2.				
43	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	75.029.397.381,54	43.990.583.745,55	58,63	62.606.649.543,00
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	604.277.998.940,56	522.663.266.328,00	86,49	1.303.090.381.381,00
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	1.189.696.598.446,44	940.303.876.464,25	79,04	1.646.496.068.022,73
46	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	1.596.705.248.215,78	1.229.832.571.263,75	77,02	2.281.781.596.417,52
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	23.241.035.250,00	739.858.977,00	3,18	5.811.543.160,00
48	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	1.865.469.754,00	113.345.000,00	6,08	15.659.928.500,00
49	Jumlah Belanja Modal		3.490.815.747.988,32	2.737.643.501.778,55	78,42	5.315.446.167.024,25
50	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.				
51	Belanja Tidak Terduga		8.860.000.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah Belanja Tak Terduga		8.860.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja		10.161.736.548.649,00	8.285.705.178.142,31	81,54	11.688.457.730.184,59
54	Belanja Transfer	5.1.2.4.				
55	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		36.445.198.000,00	36.445.198.000,00	100,00	16.000.000.000,00
56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		483.765.600,00	483.765.600,00	100,00	754.282.000,00
57	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		46.798.282.270,00	3.000.000.000,00	6,41	0,00
58	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		1.105.567.592.933,00	1.065.972.268.978,00	96,42	1.102.928.228.459,00
59	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa		1.189.294.838.803,00	1.105.901.232.578,00	92,99	1.119.682.510.459,00
60	Jumlah Belanja Dan Transfer		11.351.031.387.452,00	9.391.606.410.720,31	82,74	12.808.140.240.643,59
61						
62	Surplus/(Defisit)	5.1.3.	-165.936.420.824,47	169.661.991.389,71	-102,25	-105.993.304.529,69
63	Pembiayaan Daerah	5.1.4.				
64	Penerimaan Pembiayaan					
65	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	100,00	295.974.725.354,16

66	Jumlah Penerimaan		165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	100,00	295.974.725.354,16
67	<u>Pengeluaran Pembiayaan</u>					
68	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	24.045.000.000,00
69	Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	24.045.000.000,00
70	Pembiayaan Netto	5.1.5. 5.1.6.	165.936.420.824,47	165.936.420.824,47	100,00	271.929.725.354,16
71	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00	335.598.412.214,18	100,00	165.936.420.824,47

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI